



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI NURHAYATI
2. Jabatan : VERIFIKATOR
3. NHK : 120751

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.045.000.000**

1. Tanah Seluas 324 m2 di MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 1470 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 534.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 27.000.000****D. SURAT BERTAHAP** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 136.304.968****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 1.742.304.968**

III. HUTANG **Rp. 10.416.667**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.731.888.301**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.